

Evaluasi Pada Program Tanpa Kumuh (KOTAKU) Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota

Nadya Wulandari¹ Parjiyana²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
nadyawulandari@student.uir.ac.id parjiyana@soc.uir.ac.id

Received : July 26, 2024;

Accepted : 30 Juli 2024

Abstract

The KOTAKU (City Without Slums) program is one of the government's efforts to accelerate the handling of slum settlements with the aim of increasing access to infrastructure and basic services in settlements and improving the welfare of people in urban areas. The KOTAKU (City Without Slums) program has been implemented in Pekanbaru City, one of which is in Tanah Datar Village, Pekanbaru City District. This research uses quantitative research methods by determining a number of samples and populations which are used as sources of data or information in the samples drawn or determined from a number of studies. The data collection techniques used were interviews, questionnaires, observation and documentation. From the results of the recapitulation of respondents, the results of the recapitulation from Public Housing and Settlement Area Service employees were in the Implemented category with a percentage of 75%, Sufficiently Implemented with a percentage of 25%, and Not Implemented with a percentage of 0% from these results it was concluded that this program was implemented with a percentage of 75%. Meanwhile, the recapitulation results from the community in Tanah Datar Subdistrict were categorized as Implemented with a percentage of 45%, for the Fairly Implemented category with a percentage of 41%, and not implemented with a percentage of 14%, From these results it can be concluded that this program is quite successful with a percentage of 45%.

Keywords: Evaluation, Slum Free City Program (KOTAKU)

Abstrak

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat penanganan permukiman kumuh yang tujuannya untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sudah terlaksana di Kota Pekanbaru salah satunya di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan cara menetapkan sejumlah sampel dan populasi yang dijadikan sumber data atau informasi dalam sampel ditarik atau ditetapkan dari sejumlah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara, angket (kusioner), observasi dan dokumentasi. Dari hasil rekapitulasi responden hasil dari rekapitulasi dari Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam kategori Terlaksana dengan jumlah persentase 75%, Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 25%, dan Kurang terlaksana dengan jumlah persentase 0%, dari hasil ini maka diambil kesimpulan program ini Terlaksana dengan jumlah persentase 75%. Sedangkan hasil rekapitulasi dari masyarakat Di Kelurahan Tanah Datar dikategorikan dengan penilaian Terlaksana dengan persentase sebesar 45%, untuk kategori Cukup Terlaksana dengan persentase sebesar 41%, dan belum terlaksana dengan persentase sebesar 14% dari hasil ini diambil kesimpulan program ini Cukup Terlaksana dengan jumlah persentase 45%.

Kata Kunci : Evaluasi, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Nadya Wulandari dan Parjiyana

Pendahuluan

Administrasi adalah salah satu cabang ilmu social, administrasi juga sebagai salah satu fenomena atau ciri masyarakat modern, secara gambaran administrasi yaitu suatu bentuk daya dan upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi.

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Pekanbaru menjadi salah satu Kota Metropolitan di Indonesia, perkembangannya terjadi dengan cepat atau semakin tinggi dengan pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin bertambah dengan cepat di Kota Pekanbaru.

Perumahan dan permukiman adalah jenis pembangunan sekunder yang terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan dengan terarah, terpadu, dan terencana, maka dengan demikian perumahan dapat diartikan dengan kata lain sebagai kelompok rumah yang fungsinya untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan bertujuan agar lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang sehat, aman, tentram, dan berfungsi bagaimana yang telah diharapkan. Sedangkan permukiman adalah salah satu bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung yang baik berupa kawasan perkotaan ataupun kawasan pedesaan yang mempunyai fungsi sebagai lingkungan tinggal atau lingkungan hunian, dan sebagai tempat yang mendukung kehidupan dan penghidupan.

Permukiman Kumuh telah menjadi salah satu tantangan terkhusus bagi pemerintah, khususnya bagian daerah yang menjadi pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Permukiman kumuh sendiri dapat diartikan sebagai lingkungan yang kualitas huniannya sangat tidak layak untuk dihuni.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) salah satu program pemerintah untuk melestarikan masyarakat. Program Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam menangani di bidang social adalah menangani pembangunan serta penanganan permukiman kumuh dan dalam bidang ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan menangani kemiskinan. Dari program KOTAKU terlihat sejumlah masyarakat yang memiliki jiwa simpati terhadap lingkungan yang menjadi kawasan kumuh perkotaan.

Ada banyak faktor mempengaruhi terbentuknya kawasan kumuh di perkotaan khususnya di Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Faktor Urbanisasi dan Migrasi Penduduk
2. Faktor Lahan di Perkotaan
3. Faktor sarana dan prasarana dasar
4. Faktor social ekonomi

Ada beberapa aspek yang bisa dilihat tentang kawasan permukiman kumuh dalam kota, di antara lain : karakteristik fisik, social ekonomi, dan budaya. Menurut karakter fisik lingkungan, social ekonomi dan budaya pada kawasan permukiman kumuh antara lain sebagai berikut :

1. Perumahan yang tidak teratur.
2. Tingkat kedatan penduduk yang tinggi.
3. Fasilitas dan sarana lingkungan yang tidak memadai.
4. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah.
5. Sebagian penghasilan penghuni tidak tetap.
6. Tingkat pengangguran yang tinggi.

7. Tingkat kerawanan social dan kriminalitas cukup tinggi.
8. Masyarakat terdiri dari berbagai suku bangsa dan golongan.
9. Status lahan legal yaitu permukiman yang umumnya terletak pada aera perencanaan perkotaan, sedangkan status yang tidak legal adalah perumahan yang berada di lahan yang diperuntukkan bukan untuk permukiman.

Sementara permukiman yang bisa dikatakan bersih dan layak untuk dihuni atau permukiman yang sehat merupakan pemukiman yang telah tertata dengan kerapian pembangunannya sesuai dengan yang telah direncanakan, serta permukiman yang mempunyai aksesibilitas dengan baik. Berikut beberapa kriteria permukiman yang layak untuk dihuni dan sehat antara lain sebagai berikut :

1. Tidak terganggu oleh polusi (air, udara, suara).
2. Tersedianya air bersih.
3. Memiliki kemungkinan untuk perkembangan pembangunan.
4. Mempunyai aksesibilitas yang baik.
5. Mudah dan aman mencapai tempat kerja.
6. Tidak berada dibawah permukaan air setempat.
7. Mempunyai kemiringan rata-rata.

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud. Pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah daerah.

Lokasi kawasan kumuh yang telah ditetapkan dalam kebijakan Walikota Pekanbaru berdasarkan atas Keputusan Walikota Pekanbaru No 703 Tahun 2021 tentang perubahan keputusan Walikota Pekanbaru No. 878 Tahun 2017 Tentang Penetapan lokasi perumahan dan kawasan permukiman kumuh Kota Pekanbaru, ditetapkan bahwa luas kawasan kumuh yang ada di Kota Pekanbaru mencapai 113,56 Hektare yang terdiri dari beberapa Kecamatan dan Kelurahan Sedangkan Kecamatan Pekanbaru Kota memiliki luasan kawasan kumuh sebesar 20,30 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I
Penetapan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan Tanah Datar Kota Pekanbaru

| No. | Kecamatan | Kelurahan | Luasan Kumuh Per /kelurahan | Total Luasan Kawasan Kumuh |
|-----|-------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | Pekanbaru Kota | Suka Ramai | 6,60 Ha | 20,30 Ha |
| 2 | | Tanah Datar | 6,30 Ha | |
| 3 | | Sumahilang | 3,10 Ha | |
| 4 | | Kota Baru | 4,30 Ha | |

Sumber : Keputusan Walikota Pekanbaru No. 703 Tahun 2021 tanggal 30 September 2021 Kota Pekanbaru.

Kecamatan Pekanbaru Kota adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru yang dimana titik wilayahnya terdapat permukiman kumuh. Titik permukiman kumuh di Kecamatan Pekanbaru Kota ini terletak di 6 Kelurahan antara lain sebagai berikut simpang empat, sumahilang, tanah datar, kota baru, kota tinggi, dan sukaramai tetapi dari beberapa kelurahan tersebut terdapat 4 kelurahan yang terdata sebagai wilayah kawasan kumuh .

Tabel 2
Pengurangan Kumuh Kota Pekanbaru Di Kelurahan Tanah Datar Dari Tahun 2017 s/d Tahun 2021

| No | Kecamatan | Kelurahan | Luasan Kumuh Per /Kelurahan | Luasan Kawasan | Pengurangan Kumuh | | | | | |
|-------|----------------|-------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|------|--------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Belum tuntas |
| 1 | Kota Pekanbaru | Sukaramai | 6,60 Ha | 20,30 Ha | 1,83 | | | 0,68 | | 4,10 |
| | | Tanah Datar | 6,30 Ha | | 0,20 | 3,68 | | | | 2,42 |
| | | Sumahilang | 3,10 Ha | | | 0,88 | 1,41 | | | 0,36 |
| | | Kota Baru | 4,30 Ha | | | 1,28 | | | 1,25 | 0,18 |
| Total | | | 20,3Ha | 20, 30 Ha | 2.03 | 5,84 | 1,41 | 0,68 | 1,25 | 7,06 |

Sumber : Keputusan Walikota Pekanbaru No. 703 Tahun 2021 tanggal 30 September 2021 Kota Pekanbaru.

Terlihat pada tabel diatas Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota mempunyai luasan kawasan kumuh sebesar 6,30 Ha, sedangkan kawasan kumuh yang belum tuntas sebesar 2,42 Ha.

Permukiman kumuh dilihat dari lokasinya yang dibedakan menjadi permukiman kumuh di tepian jalan, drainase kota, dan tengah kampung. Kelurahan Tanah Datar merupakan salah satu wilayah dengan luasan 23,17 Hektare. Pada tahun 2017 hanya 2.8 Hektare wilayah kawasan yang kumuh, sementara pada 2021 bertambah luas menjadi 6.8 hektare. Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATUAN adalah berdasarkan pemuktahiran data permukiman kumuh yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 sampai dengan 2021 oleh Kelompok Kerja (POKJA) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan, maka penulis menetapkan tujuan penelitian yang hendak dicapai yakni untuk mengetahui Bagaimanakah Evaluasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dan Apa Saja Yang Menjadi Faktor Penghambat yang Dihadapi Oleh Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dalam Mengatasi Evaluasi Kawasan Permukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru.

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota dan untuk mengetahui Faktor-Faktor Apasaja Yang Menjadi Pengambat Evaluasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi

Menurut Sondang P Siagian (Beddy Irawan (2017;28) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Defenisi administrasi yang secara implisit menggambarkan keseluruhan dimensi itu dirumuskan oleh The Liang Gie (Zulkifli, 2009:13) administrasi merupakan segenap rangkaian penataan terhadap pekerja pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Beddy Irawan (2017;25) juga mengatakan di Indonesia merupakan kegiatan dengan bantuan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelum sering didefinisikan dalam artian sempit. Oleh karena itu dijelaskan juga administrasi dalam "arti sempit" maupun "arti luas" sebagai berikut :

1. Administrasi dalam arti sempit

Administrasi khususnya di Indonesia sering dimaknai dengan kegiatan "*tulis menulis, catat, mencatat, ketik mengentik dan surat menyurat*", yaitu proses kegiatan yang berkaitan dengan penerima informasi secara tertulis mulai dari penyusunan, penulisan hingga pengieim informasi dan sampai pada pihak yang telah dituju.

2. Admnistrasi dalam arti luas

Sebagai proses kerjasama saat penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang seacara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Secara etimologis, admnistrasi ditemukan dalam bahasa latin ad dan ministrate, yang berarti "membantu, melayani, atau memenuhi", seta administration yang berarti "pembantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan". Administrazione disebut dalam bahasa Italia (dalam Syafri, 2023;3).

Konsep Organisasi

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang bawahan. (dalam Yussa Tarmizi, Hendry Andry 2015:14).

Menurut Siagian (2016:6) mendefinisikan bahwa organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antar dua orang atau lebih yang bekerja sama secara format terikat dalam rangka

pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Dwight Waldo (dalam Syafiie 2018:114) organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antar orang-orang pada suatu system administrasi.

Menurut Stephen P. Robbins (dalam Irawan 2017:38) organisasi diartikan sebagai kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Konsep Manajemen

Menurut James A. F Stoner (dalam Roni 2020:2) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain, dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Robbins dan Coulter (dalam Taufiqurokhman dan Satispi, 2018:7) menyebutkan manajemen adalah proses pengkoordinasian dan pengintegrasian kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efektif dan efisien melalui orang lain.

Menurut Fayol (dalam Taufiqurokhman dan Satispi, 2018:13-14) manajemen adalah sebuah kegiatan umum dari semua usaha manusia dalam bisnis, pemerintahan, dan rumah tangga.

Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Drs. Malayu P. Hasibuan, (2017) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Menurut Barry Cushway (dalam Sedarmayanti 2017:1) manajemen sumber daya manusia sebagai rangkaian strategis, proses, dan aktivitas yang didesain untuk menunjang tujuan perusahaan dengan cara mengintegrasikan kebutuhan perusahaan dan individu.

Konsep Evaluasi

Menurut Dunn, Fungsi Evaluasi dalam menganalisis kebijakan adalah menyediakan informasi valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, kemudian memberikan kejelasan dan kritik nilai-nilai yang mendasari pilihan tujuan, sasaran, dan penyediaan informasi bagi perumusan masalah dan informasi praktis. (Dunn, 2013). Kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (dalam Subarsono, 2013;126) mencakup lima indikator antara lain :

- a. Efektifitas.
- b. Kecukupan.
- c. Pemerataan.
- d. Responsivitas.
- e. Ketepatan.

Pengembangan kriteria evaluasi oleh Dunn (dalam Subarsono, 2013;126) sebagaimana di atas, maka dapat dikembangkan dari setiap item tersebut dengan memberikan makna yang lebih jelas, yakni :

- a. Efektifitas
Menurut pendapat Mahmudi (2005:92) mendefinisikan efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.
- b. Kecukupan
Kecukupan dalam kebijakan public dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dari berbagai hal. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003: 430).
- c. Pemerataan
Pemerataan dalam kebijakan public dapat diartikan dengan keadilan yang memberikan dan diperoleh sasaran kebijakan public. Dunn (2003:434) menyatakan bahwa kriteria kesamaan erat hubungannya dengan rasionalitas legal, social, dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
- d. Responsivitas
Menurut Dunn (2003: 437) menyatakan bahwa responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
- e. Ketepatan
Dunn, menyatakan bahwa kelayakan adalah kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternative untuk dijadikan rekomendasi dengan nilai apakah hasil dari alternative yang direkomendasikan merupakan pilihan tujuan yang layak.

Wirawan (2011:71) menyampaikan evaluasi sebagai suatu masukan yang menggambarkan kebutuhan yang diperlukan dalam setiap program untuk terus diperhatikan.

Dengan demikian evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan atau program. Boyle (dalam Suharto, 2006:120) mengatakan bahwa evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Dengan demikian evaluasi kebijakan bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran.

Untuk itu evaluasi merupakan proses formal yang diterapkan untuk menilai kinerja program dengan langkah mengawasi pelaksanaan program. Salah satu sasaran yang hendak dilihat adalah ada tidaknya penyimpangan pelaksanaan atas program yang dijalankan sesuai rencana, sehingga diperlukan penilaian secara terus menerus atas program yang dilaksanakan agar berbagai bentuk penyimpangan yang tidak sesuai rencana dapat diatasi dan program berjalan sesuai rencana melalui pengawasan yang intens. Jika ditemukan penyimpangan, maka dapat dengan cepat dilakukan perbaikan agar tidak menyimpang dari rencana. Untuk melaksanakan evaluasi dibutuhkan: kinerja yang sesuai dengan harapan, sehingga dibutuhkan *man, money, material, machine, dan method* yang dipergunakan untuk melaksanakan program.

Menurut Wirawan (2011:22-24) tujuan dari evaluasi antara lain :

1. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat.
2. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
3. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana.
4. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang jalan, mana yang tidak jalan.
5. Pengembangan staf program.
6. Memenuhi ketentuan undang-undang.
7. Akreditasi program.
8. Mengukur cost effectiveness dan cost-efficiency.
9. Mengambil keputusan mengenai program.
10. Accountabilitas.
11. Memberikan balikan kepada pemimpinan dan staf program.
12. Memperkuat posisi politik.
13. Mengembangkan teori ilmu evaluasi dan riset evaluasi.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi digunakan untuk mengukur suatu program apakah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program atau tidak.

Konsep Pelaksanaan

Menurut Wahab dan Van Meter dan Van Horn (2012:135) "Pelaksanaan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang di arahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan". Dalam hal ini, pelaksanaan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat di praktekkan ke dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Cahyononim dalam J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zin (2010:1487) mengatakan Pelaksanaan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Konsep Kawasan

Menurut NIA K. Pontah dalam bukunya yang berjudul pengantar perencanaan perkotaan (2008) kawasan merupakan wilayah dalam batasan fungsional tertentu. Menurut Undang-undang No. 26 Pada Tahun 2007 mendefinisikan sebagai wilayah yang memiliki fungsi utama lingkungan atau bididaya. Contohnya kawasan antara lain : kawasan lindung, kawasan budidaya dalam suatu wilayah kabupaten: kawasan perumahan, kawasan pusat kota, dan kawasan industry dalam suatu kota.

Kawasan Kawasan Prioritas

Peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan yang menjadi kawasan prioritas di Kelurahan Tanah Datar mengacu pada beberapa kebijakan yang telah diputuskan sebelumnya.

Konsep Permukiman

Permukiman merupakan lingkungan perumahan yang berisi berbagai aktivitas di dalamnya dengan sarana prasarana pendukungnya. Hal ini mempunyai makna yang luas bahwa diluar permukiman berupa wadah fisik pendukung saja. Sementara permukiman

merupakan perpaduan antara wadah (Alam, Lingkungan dan jaringan) dan isinya (manusia yang hidup bermasyarakat dan berbudaya di dalamnya) menurut (Kuswanto, 1997:21).

Konsep Kawasan Permukiman

Kawasan Permukiman bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lingkungan, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagian lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan. (UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Konsep Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Konsep Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi penduduk merupakan keadaan atau kondisi fertilitas, mortalitas dan migrasi yang dihitung untuk masa mendatang pada satu kawasan tertentu. Melalui perhitungan ini dapat diketahui ketercukupan penambahan berbagai fasilitas dan utilitas yang dibutuhkan, sehingga memudahkan dalam perencanaan kawasan dan perumusan program pembangunan yang sesuai kebutuhan.

Konsep Proyeksi Jumlah Kepadatan Penduduk

Prediksi jumlah dan sebaran penduduk menjadi sebuah masukan dasar yang sangat berguna dalam mengartisipasi berbagi permasalahan pada masa mendatang di kawasan perencanaan.

Metode

Peneliti menarik dan menetapkan sejumlah sampel dan populasi yang dijadikan sumber data atau informasi diaman sampel ditarik atau ditetapkan dari sejumlah populasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan penelitian survey, dimana penelitian survey diabatasi sebagai mewakili seluruh populasi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan suatu metode yang akan digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada suatu saat tertentu untuk mengungkapkan fakta empiris secara objektif dengan berdasarkan logika ilmunan.

Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012;8) merupakan metode penelitian yang berdasarkan filsafat positivis, dan digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis dan bersifat kuantitatif. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan kuosioner yang dimaksud untuk diseberkan pada populasi yang sudah ditentukan.

Hasil dan Pembahasan

A. Identitas Responden

Responden penelitian adalah pihak yang dijadikan sampel penelitian atau pihak yang diberikan daftar pertanyaan yang menyangkut penelitian ini. Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Evaluasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Oleh Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DiKelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota. Identitas responden bertujuan memberikan gambaran mengenai keadaan responden yang menjadi objek utama pada penelitian ini.

1. Jenis Kelamin

Pada identitas responden jenis kelamin di Kelurahan Tanah Datar ini terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Jenis ini mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan terhadap bekerja. Untuk lebih jelas tentang jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3
Identitas Responden Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.

| No | Jenis Kelamin | Jumlah Responden | Persentase |
|--------|---------------|------------------|------------|
| 1 | Laki-laki | 7 | 88% |
| 2 | Perempuan | 1 | 12% |
| Jumlah | | 8 | 100% |

Sumber : Data Penelitian, 2024.

Tabel 4
Identitas Responden Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin.

| No | Jenis Kelamin | Jumlah Responden | Persentase |
|--------|---------------|------------------|------------|
| 1 | Laki-laki | 20 | 67% |
| 2 | Perempuan | 6 | 33% |
| Jumlah | | 26 | 100% |

Sumber : Data Penelitian, 2024.

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan salah satu identitas yang melekat pada diri seseorang, untuk itu identitas tingkat pendidikan dalam penelitian dijadikan bagian tidak terpisahkan untuk digambarkan pada penelitian mengenai evaluasi program KOTAKU di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota. Tingkat pendidikan menjadi gambaran tentang pengetahuan yang pernah diterima seseorang dibangku sekolah, sehingga dengan pendidikan yang melekat pada dirinya mampu menggambarkan pengetahuan, pemahaman, dan daya analisis dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5
Identitas Responden Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

| No | Tingkat Pendidikan | Responden | Persentase |
|--------|--------------------|-----------|------------|
| 1 | S1 | 2 | 24% |
| 2 | S2 | 6 | 76% |
| Jumlah | | 8 | 100% |

Sumber : Data Penelitian, 2024.

Tabel 6
Identitas Responden Masyarakat
Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

| No | Tingkat Pendidikan | Responden | Persentase |
|--------|--------------------|-----------|------------|
| 1 | SLTP | 2 | 8% |
| 2 | SLTA | 19 | 74% |
| 3 | Diploma | 1 | 3% |
| 4 | Sarjana | 4 | 15% |
| Jumlah | | 26 | 100% |

Sumber : Data Penelitian, 2024.

3. Tingkat usia

Dalam tingkat usia responden menggambarkan kematangan berpikir seseorang dalam mengambil sebuah keputusan untuk melakukan tindakan yang akan jalannya. Untuk itu pada penelitian ini tingkat usia dijadikan salah satu identitas responden, karena usia melekat pada diri dalam memberikan tanggapan atas evaluasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DiKelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7
Identitas Responden Pegawai Berdasarkan Tingkat Usia

| No | Tingkat Usia | Responden | Persentase |
|--------|--------------|-----------|------------|
| 1 | 20 -30 | 1 | 12% |
| 2 | 31 – 40 | 2 | 25% |
| 3 | 41 – 50 | 5 | 63% |
| Jumlah | | 8 | 100% |

Sumber : Data Penelitian, 2024.

Tabel 8
Identitas Responden Masyarakat Berdasarkan Tingkat Usia

| No | Tingkat Usia | Responden | Persentase |
|--------|--------------|-----------|------------|
| 1 | 20 – 30 | 2 | 13% |
| 2 | 31 – 40 | 8 | 33% |
| 3 | 41 – 50 | 16 | 54% |
| Jumlah | | 26 | 100% |

Sumber : Data Penelitian, 2024.

Hasil Penelitian Evaluasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DiKelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota

Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam menangani permasalahan kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru Khususnya Kelurahan Tanah Datar penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari 5 indikator yang menjadi acuan peneliti yaitu efektifitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan, yang dimana bertujuan untuk mengevaluasi program yang dibuat oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh yang ada di Kota Pekanbaru khususnya Kelurahan Tanah Datar.

1. Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan diantara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuannya, maka semakin efektif organisasi (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) dan program lingkungan sehat perumahan. Untuk itu pada penelitian ini efektivitas merupakan keterkaitan antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang diharapkan dari kegiatan program Kotaku yang telah dijalankan dalam upaya mengurangi wilayah kumuh menjadi layak huni.

Hasil ini diperoleh dari sebagian besar responden pegawai telah memberikan tanggapan pada pertanyaan yang diajukan berkaterori tercapai. Di mana seluruh responden memberikan tanggapan baik pada pertanyaan membentuk program, masyarakat menyambut baik program tersebut, menjalankan sosialisasi, dan mengetahui apa yang dibahas pada saat sosialisasi.

Hasil ini diperoleh dari sebagian besar responden masyarakat telah memberikan tanggapan pada pertanyaan yang diajukan berkaterori Cukup Tercapai. Di mana seluruh responden memberikan tanggapan terlaksana pada pertanyaan membentuk program, sudah lama program dibuat, program bisa mengatasi masalah, melibatkan masyarakat dalam pembuatan program, masyarakat menyambut baik program ini, sudah menjalankan sosialisasi program dengan masyarakat, tempat yang dilakukan sosialisasi program, sering melakukan sosialisasi, dan mengetahui apa saja yang dibahas ketika sosialisasi.

Jadi, berdasarkan dari observasi peneliti, disimpulkan bahwa efektivitas program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Tanah Datar sudah Cukup Tercapai.

2. Kecukupan

Kecukupan menjadi salah satu indikator yang ditetapkan dalam mengevaluasi pelaksanaan program yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam mengatasi kawasan permukiman kumuh dengan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Tanah Datar, dan Pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh yang ada.

Tanggapan yang disampaikan responden pegawai di atas memberikan keterangan bahwa dalam pelaksanaan program kerja untuk mengatasi permukiman kumuh telah melibatkan masyarakat setempat sebagai objek yang menerima manfaat atas program

tersebut, sehingga semua tantangan dan hambatan dijalankan dengan persetujuan bersama. Dengan demikian jelaslah bahwa indikator kecukupan telah terpenuhi dalam berbagai aspek pemerintah dan masyarakat penerima manfaatnya. Di mana pada penilaian terlaksana terlihat seluruh pegawai memberikan tanggapannya tentang melakukan program Kotaku dan masyarakat sudah merasakan manfaat program. Sedangkan penilaian cukup terlaksana ditanggapi pada seluruh item yang ditanyakan.

Berdasarkan dari hasil pemaparan observasi peneliti diatas, maka disimpulkan bahwa Evaluasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota dalam indikator kecukupan ini di kategorikan dalam Cukup Tercapai.

3. Pemerataan

Pemerataan menjadi salah satu dari beberapa indikator yang ditetapkan dalam mengevaluasi sebuah kebijakan, sehingga dalam penelitian pemerataan ditetapkan sebagai indikator yang dijadikan tolak ukur dalam mengevaluasi program KOTAKU.

Berdasarkan dari observasi yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai indikator pemerataan, maka peneliti melihat bahwa realisasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sudah Cukup Terlaksana, meskipun belum merata. Karena pembangunan yang dilakukan belum semua hanya sebagian saja. Perlu diketahui bahwa dari 13 RT dan 5 RW yang ada di Kelurahan Tanah Datar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman hanya mempunyai wewenang terhadap kawasan itu saja.

Jadi, berdasarkan dari hasil pemaparan hasil observasi peneliti, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota dalam indikator pemerataan ini sudah Cukup Tercapai.

4. Responsivitas

Responsivitas dalam penelitian ini menjadi indikator yang digunakan dalam mengukur program yang dijalani. Untuk itu telah ditetapkan beberapa sub indikator sebagai penilaian yaitu untuk Melakukan analisis terhadap perkembangan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tanah Datar, dan Melakukan tindakan terhadap pencegahan untuk perkembangan kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti mengenai indikator responsivitas, maka peneliti melihat bahwa Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman telah melakukan tindakan pencegahan untuk menekan perkembangan kawasan permukiman kumuh yang ada yaitu dengan merealisasikan program Kota Tanpa Kumuh Di Kelurahan Tanah Datar. Masyarakat sangat mengapresiasi kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah menjalankan pembangunan untuk mengatasi permukiman kumuh ditempat mereka tinggal. Masyarakat juga turut bangga karena diikut sertakan dalam proses merealisasikan pembangunan, drainase dan hydrat kebakaran. Yaitu dengan cara masyarakat yang memiliki keahlian atau kemampuan untuk melakukan pekerjaan tersebut.

5. Ketepatan

Ketepatan ini tertuju pada nilai atau harga diri dari tujuan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan kuatnya dari hasil asumsi yang menjadi landasan tujuan tersebut. Ketepatan merupakan kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah langkah alternative yang

dijadikan untuk rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari langkah rekomendasi itu menjadi pilihan yang layak.

Dari observasi yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai indikator ketepatan, maka peneliti melihat bahwa program Kota Tanpa Kumuh yang telah dijalankan di Kelurahan Tanah Datar suda tepat dan sudah terlaksana dengan cukup baik. Karena Kelurahan Tanah Datar merupakan salah satu yang termasuk dari beberapa kawasan permukiman kumuh yang ada di Kota Pekanbaru.

Jadi dari pemaparan dari hasil observasi peneliti diatas, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota dalam indikator ketepatan sudah cukup terlaksana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Tanah Datar bahwa fasilitas yang diberikan kepada masyarakat tidak bisa mereka gunakan secara optimal sesuai dengan fungsinya serta kesadaran masyarakat yang kurang bahwa kekumuhan tersebut merupakan permasalahan yang harus mereka selesaikan sendiri, pemerintah hanyar sebagai alat membantu untuk menyediakan fasilitas yang mereka perlukan untuk permasalahan tersebut. Menyebabkan program ini kurang optimal meski dari pihak pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik, karena program ini dalah masyarakat itu sendiri. Program akan dikatakan berhasil apabila fasilitas yang dibangun bisa digunakan oleh masyarakat.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai indikator kecukupan, peneliti melihat bahwa dalam merealisasikan program kota tanpa kumuh (KOTAKU), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru membangun drainasse, perbaikan jalan rusak, hydrant kebakaran. Sebelum melakukan pembangunan ini pihak dinas harus terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, yakni melakukan inventarisir terhadap mayarakat sekita yang meiliki kemauan kerja sama agara masyarakat terlibat dalam pembangunan tersebut. Hasil dari program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini tidak ada lagi banjir ketika hujan di Kelurahan Tanah Datar, namun kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya masih kurang, sehingga lingkungan masih terlihat kotor dan kurang bersih.

Faktor Penghambat Evaluasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota

Berdasarkan dari analisis hasil peneliti yang dilakukan mak dapat diambil kesimpulan beberapa hal apa saja yang menjadi factor penghambat dalam Evaluasi Pada Peogram Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, yaitu sebagai berikut ini :

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru kurang melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan pentingnya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat.
2. Tingkat kesadaran terhadap masyarakat yang kurang dalam memerhatikan lingkungan sekitar masih rendah, yakni dengan membuang sampah sembarangan, tidak melakukan gotong royong dengan rutin dalam seminggu, akibatnya sampah

menjadi berserakan, drainase tersumbat sehingga lingkungan menjadi kotor dan tidak bersih.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian Evaluasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota dapat diambil kesimpulan bahwa Program Dinas Petumhan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota berada pada kategori 50% dari hasil jawaban seluruh responden pegawai dan masyarakat yang terletak pada kategori 34%-66%.

Jadi dari pemaparan dari hasil observasi peneliti diatas, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota dalam indikator ketepatan sudah cukup terlaksana.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Agustino, Leo. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Budi, Winarno. (2002). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo.
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, M. S. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Islamy, Muh.Irfan, 2017, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Universitas Terbuka
- Manullang, M. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2018. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Malang : SOFA Mandiri Dan Indonesia Print.
- Nurmansyah. 2011. *Manajemen Sumber Daya Pekanbaru* : UNILAK Press.
- Ndraha Tallizidulu. 2003. *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru I*. Jakarta, Rineke Cipta.
- Pasolong, Harbani. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Balairung.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta : UNY Press

- Syafiie, Inu Kencana. 2015. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Terry, George R. (2014). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Wirawan. (2011). *Evaluasi (Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Perseda.
- Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen*. Pekanbaru. UIR Press.
- Zulkifli. et. al. 2013. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: Fisipol UIR
- Zulkifli Dan Yogya, Moris Adidi. 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing.
- Hermawan, B. Barchia, Faiz M. Lidiawati, Yenni. 2021. *Evaluasi Program Penataan Permukiman Kumuh Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu*.
- Bahri, Syamsul. Muhibuddin, Andi. Arifin, Chadijah. 2022. *Evaluasi Program Kotaku Dalam Penanganan Kumuh Kota Parepare (Studi Kasus: Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soerang)*.
- Yamin, Nur, Muhammad. Putri, Utami, Mega. 2022. *Evaluasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) (Studi Di Kecamatan Mariso Kelurahan Mariso Kota Makassar)*.
- Poli, Hanny, Mononimbar, Windy. Kamuh, Amelia. 2019. *Evaluasi Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kota Tumohon*.
- Puryanti, Vetti. Mulki, Zulkifli, Gusti. Madhianti, Rinalva, Tiara. 2018. *Evaluasi Permukiman Kumuh Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).

- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.

- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.

- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Stretegi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE

- Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163-175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Masyarakat Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.

- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDI KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.

- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.

- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.

Regulasi:

Berdasarkan SK Walikota No. 703 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 151 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perumahan dan Permukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh.

Berdasarkan Surat Edaran No. 40/SE/DC/2016 Tentang Program Tanpa Kumuh.

Berdasarkan PUPR No.2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Berdasarkan Permen Pu No. 1/Prt/M/2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Peraturan Menteri No.7 Tahun 2018 Pasal 19 Ayat 4 Tentang Evaluasi Dilaksanakan Satu Tahun Sekali atau Sewaktu-waktu Apabila Diperlukan.